



Pemberdayaan Berkelanjutan: Strategi Akses Desa Wisata sebagai Tameng dari Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Menggunakan Alat Berat

M. Gazali¹, Najmul Hayat²

^{1,2}*UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia*

A B S T R A C T

SUSTAINABLE EMPOWERMENT: VILLAGE TOURISM ACCESS STRATEGY AS A SHIELD FROM ILLEGAL GOLD MINING ACTIVITIES USING HEAVY EQUIPMENT. Sungai Telang Village is endowed with abundant natural resources, characterized by pristine water, picturesque hills, stunning waterfalls, preserved village forests, and a network of tributaries flowing around residential settlements. These natural potentials hold tremendous opportunities for development through optimal management. However, the presence of gold deposits in this region has attracted illegal mining activities using heavy equipment that threatens the sustainability of these natural resources. Although the community has conducted conventional resistance through various rejection actions, these efforts have not been sufficiently effective in permanently stopping mining activities. This research employs a sustainable empowerment approach and Participatory Action Research to facilitate the community in identifying and formulating relevant strategies to permanently cease illegal mining operations. Through this approach, the community is expected to play an active role in protecting and preserving their village's natural resource potential sustainably. Thus, environmental conservation efforts can progress alongside community welfare improvement through sustainable and environmentally friendly village potential development. The results of this research are expected to serve as a community-based natural resource management model that can be adapted by other villages facing similar challenges. This study will contribute to the growing body of literature on community-based environmental conservation and sustainable resource management in developing regions. The findings will provide valuable insights into effective strategies for combating illegal mining while promoting sustainable local development.

Keywords: Sustainable empowerment, tourism village, illegal gold mining.

A B S T R A K

Desa Sungai Telang merupakan kawasan yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, ditandai dengan keberadaan air yang jernih, rangkaian perbukitan yang menawan, air terjun yang memukau, hutan desa yang lestari, serta jaringan anak sungai yang mengalir mengelilingi permukiman penduduk. Seluruh potensi alam ini menyimpan peluang besar untuk dikembangkan melalui pengelolaan yang optimal. Namun, keberadaan kandungan emas di wilayah ini telah mengundang aktivitas penambangan ilegal dengan penggunaan alat berat yang mengancam kelestarian sumber daya alam tersebut. Meskipun masyarakat telah melakukan perlawanan secara konvensional melalui berbagai aksi penolakan, upaya ini belum cukup efektif untuk menghentikan aktivitas pertambangan secara permanen. Pemberdayaan ini menggunakan pendekatan pemberdayaan berkelanjutan dan Participatory Action Research untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi dan merumuskan strategi yang relevan guna menghentikan pertambangan ilegal secara permanen. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam melindungi dan melestarikan potensi sumber daya alam desa mereka secara berkelanjutan. Dengan demikian, upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi desa yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi model pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang dapat diadaptasi oleh desa-desa lain yang menghadapi permasalahan serupa. Temuan ini akan memberikan wawasan berharga mengenai strategi efektif untuk memerangi penambangan liar sekaligus mendorong pembangunan lokal yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Kunci: Pemberdayaan berkelanjutan, desa wisata, pertambangan emas ilegal

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
13.02.2024	06.06.2025	20.06.2025	26.06.2025

Suggested citation:

Gazali, M., Hayat, N. (2025). Pemberdayaan Berkelanjutan: Strategi Akses Desa Wisata sebagai Tameng dari Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Menggunakan Alat Berat. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 52-63. DOI: 10.24235/dimasejati.v7i1.16722

OpenAccess URL: <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/dimasejati/article/view/000>

¹ Corresponding Author: Jurusan Tadris Matematika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; Jl. Jambi-Muarabulian KM. 16 Simpang Sungaiduren Kab. Muaro Jambi, Jambi , Indonesia. 36363; Email: gazali@uinjambi.ac.id

PENDAHULUAN

Masyarakat desa kerap berada di bawah tekanan dalam mempertahankan keunikan potensi wilayahnya akibat konsekuensi pembangunan (Resa, 2022). Namun ada pula kelompok masyarakat yang berada di bawah tekanan kelompok masyarakat mapan yang menjadikan mereka maupun sumber daya alam yang mereka miliki sebagai sasaran eksploitasi. Salah satu bentuk eksploitasi sumber daya alam yang kentara khususnya di Provinsi Jambi adalah pertambangan emas ilegal.

Dari sepuluh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi, lima di antaranya memiliki aktivitas pertambangan emas ilegal. Sebagaimana dilansir dari salah satu media online lokal, luas area pertambangan di tahun 2022 meningkat sebesar 8,3% dari tahun sebelumnya. Dengan meluasnya wilayah aktivitas pertambangan ilegal tersebut, maka jumlah masyarakat yang terdampak tentunya juga meningkat. Di kabupaten Bungo sendiri di mana lokasi kelompok masyarakat sasaran pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan luas area pertambangan emas ilegal sebesar 30,5%.

Tabel 1. Daftar kabupaten dan luas area pertambangan emas ilegal di provinsi Jambi

Kabupaten	Luas Area Pertambangan Emas Ilegal Per Tahun (ha)		
	2020	2021	2022
Sarolangun	15.254	15.659	15.878
Merangin	15.812	15.857	16.072
Bungo	5.611	6.748	8.801
Tebo	2.851	4.090	5.101
TeboKerinci	29	7	44
Total	39.577	42.361	45.896

Sumber: KKI Warsi (2022)

Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin Tiga Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi merupakan salah satu target sasaran aktivitas pertambangan emas ilegal menggunakan alat berat. Uniknya, desa tersebut diberkati Tuhan dengan limpahan potensi sumber daya alam yang berbasis di sepanjang aliran sungai. Jika pertambangan emas ilegal dibiarkan, maka dampak buruknya akan sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat lokal, semua potensi sumber daya alam yang dimiliki desa akan sirna peluangnya untuk dimaksimalkan dalam pengelolaan potensi. Salah satu dampak buruk terbesar aktivitas pertambangan tersebut adalah air menjadi keruh. Air sebagai sumber air bersih bagi masyarakat setempat akan kehilangan fungsinya. Air terjun sebanyak 18 titik lokasi yang tersebar di 12 aliran anak sungai akan kehilangan muruahnya untuk dikunjungi oleh para peminat pariwisata. Lubuk Larangan (baca; Sari et al., 2016) sebanyak 10 titik lokasi yang juga tersebar di sepanjang aliran anak sungai akan punah karena mengandalkan air bersih.

Aktivitas pertambangan emas ilegal menggunakan alat berat di Desa Sungai Telang telah dilakukan sejak tahun 2021. Aktivitas tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat lokal melainkan pihak luar yang didanai yang memiliki kekuatan relasi kuasa dengan beberapa pemerintah daerah (menurut penuturan warga). Di awal, para penambang berjanji tidak melakukan aktivitas yang mengarah ke aliran sungai. Namun semakin lama dibiarkan, aktivitas mereka sampai juga di tepian sungai yang berdampak pada keruhnya air sungai yang menjadi sumber air bersih bagi masyarakat lokal. Melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sebelumnya, kesadaran masyarakat berhasil terbangun terkait pentingnya menjaga sumber daya alam yang dimiliki. Setelah pemberdayaan tersebut, masyarakat kemudian melakukan aksi penolakan sebanyak dua kali dan berhasil menghalau keluar alat-alat berat yang melakukan aktivitas pertambangan.



Gambar 1. (a) aksi penolakan pertama kegiatan pertambangan, (b) aksi penolakan kedua, dan (c) kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan

Dalam konteks Sungai Telang, kesadaran kolektif dari masyarakat sangat dibutuhkan mengingat besarnya ancaman kerusakan sumber daya alam serta hilangnya peluang pengelolaan potensi sumber daya alam akibat pertambangan. Masyarakat Sungai Telang sudah sampai pada kesadaran kolektif tersebut, di mana mereka meyakini bahwa untuk menolak dan menghalau aktivitas pertambangan dibutuhkan bukan sekadar komitmen bersama, tetapi juga aksi bersama dalam bentuk bergegas melakukan pengelolaan potensi.

Adapun bentuk pengelolaan potensi yang tepat bagi masyarakat Sungai Telang adalah pengembangan pariwisata berbasis desa wisata. Tidak sekedar mewujudkan destinasi wisata, tetapi masyarakat perlu melanjutkan ke tahap mengakses status desa wisata sebagai bentuk legalitas desa untuk bebas dari aktivitas pertambangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemberdayaan berkelanjutan akan sangat membantu masyarakat lokal menjaga potensi sumber daya alam yang dimiliki. Mengapa harus pemberdayaan berkelanjutan? Pertama, kesadaran kolektif masyarakat yang merupakan syarat terjadinya pemberdayaan berkelanjutan (Junaid & Salim, 2019) telah terbangun di Desa Sungai Telang. Kedua, pemberdayaan berkelanjutan akan memfasilitasi masyarakat Sungai Telang sebagai kelompok marginal keluar dari ketidakberdayaan (Raj et al., 2022). Ketiga, pemberdayaan berkelanjutan sangat dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata berbasis desa wisata (Rochman, 2016). Dan keempat, masyarakat lokal meminta untuk tetap didampingi dalam bentuk pemberdayaan berkelanjutan karena masih minimnya pengetahuan untuk mengakses desa wisata.

Oleh karena itu, pemberdayaan ini bertujuan memfasilitasi Masyarakat Sungai Telang mengidentifikasi dan menentukan pendekatan strategis yang relevan untuk menghentikan pertambangan emas illegal menggunakan alat berat secara permanen di Desa Sungai Telang.

BAHAN DAN METODE

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat Sungai Telang sebagaimana telah dipaparkan di awal, maka metode pemberdayaan yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR). PAR digunakan untuk menguatkan kesadaran kolektif (Dudgeon et al., 2017) masyarakat Sungai Telang terkait pentingnya “memotong” rantai aktivitas pertambangan emas ilegal melalui pemberdayaan yang di dalamnya memuat partisipasi, penelitian dan tindakan (Benjamin-Thomas et al., 2018)

Pemberdayaan ini menggunakan tiga tahapan PAR (Chevalier, 2019). Pertama, mengorganisir kegiatan pemberdayaan serta mengumpulkan pengetahuan. Di tahapan ini senada dengan tahap to know (Afandi, 2017) yaitu membangun proses enkulturasi dan mengetahui kondisi nyata dalam konteks masyarakat Sungai Telang. Kedua, masyarakat mendefinisikan dan melakukan analisis kritis terhadap masalah yang mereka hadapi atau dikenal juga dengan tahap to understand (Afandi, 2017). Dan ketiga, merencanakan serta melaksanakan rencana tindakan penyelesaian masalah yang dihadapi. Tahapan ini merupakan

tahap to plan dan to action (Afandi, 2017) di mana pemberdayaan memfasilitasi masyarakat Sungai Telang melakukan analisis rencana strategis hingga merealisasikan rencana strategis tersebut (aksi).

Untuk mengorganisir kegiatan pemberdayaan dan mengumpulkan pengetahuan, digunakan transek dan pemetaan wilayah (Cain, 2014) guna memfasilitasi masyarakat mengamati sumber daya yang mereka miliki sekaligus memetakan permasalahan yang tengah dihadapi. Selanjutnya, agar masyarakat dapat mendefinisikan dan menganalisis masalah yang dihadapi, digunakan analisis pohon masalah dan pohon harapan (Afandi, 2017). Terakhir, untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan, digunakan analisis gap masalah, harapan dan program kegiatan (Afandi, 2017), dan untuk merealisasikan program pemberdayaan digunakan pendekatan *focus group discussions* (Budiman et al., 2022)

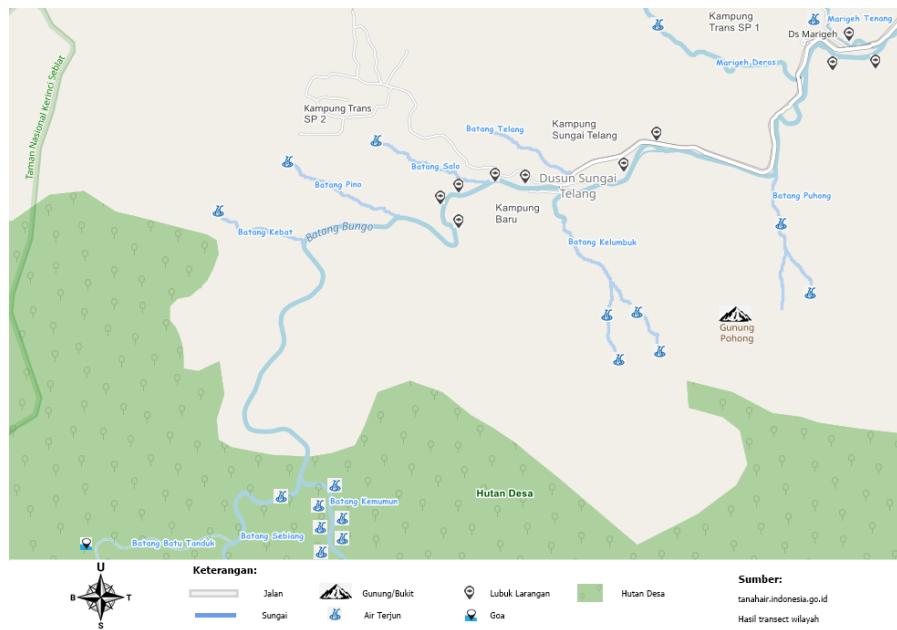
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan; Proses Mengumpulkan Pengetahuan

Pemberdayaan diawali dengan mengumpulkan pengetahuan bersama masyarakat menggunakan teknik transek wialayah. Penelusuran wilayah fokus pada potensi sumber daya alam yang memiliki peluang wisata dengan melibatkan peneliti, perangkat desa, dan perwakilan pengurus Pokdarwis sebagai bentuk mobilisasi masyarakat lokal turut terlibat dalam produksi pengetahuan. Sembari penelusuran dilakukan, setiap peserta mengidentifikasi pengetahuan yang dibutuhkan untuk membangun argumen bahwa Sungai Telang layak menjadi desa wisata.



Setelah penelusuran dilakukan, kemudian disusun peta potensi sumber daya alam yang memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata.

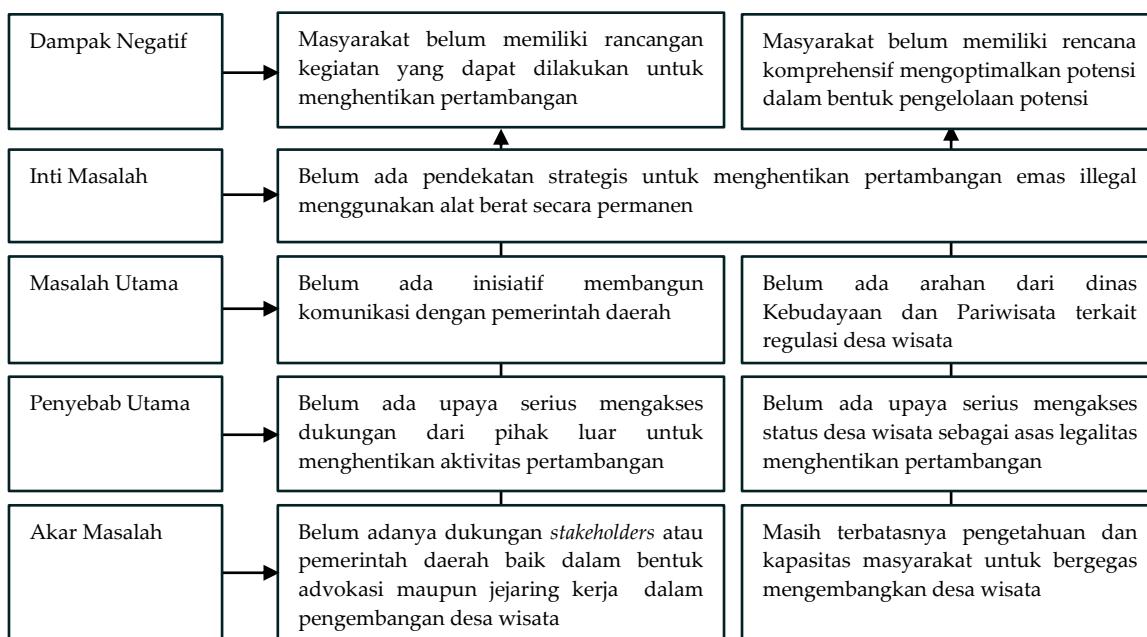


Gambar 3. Peta potensi sumber daya alam Desa Sungai Telang yang memiliki peluang wisata

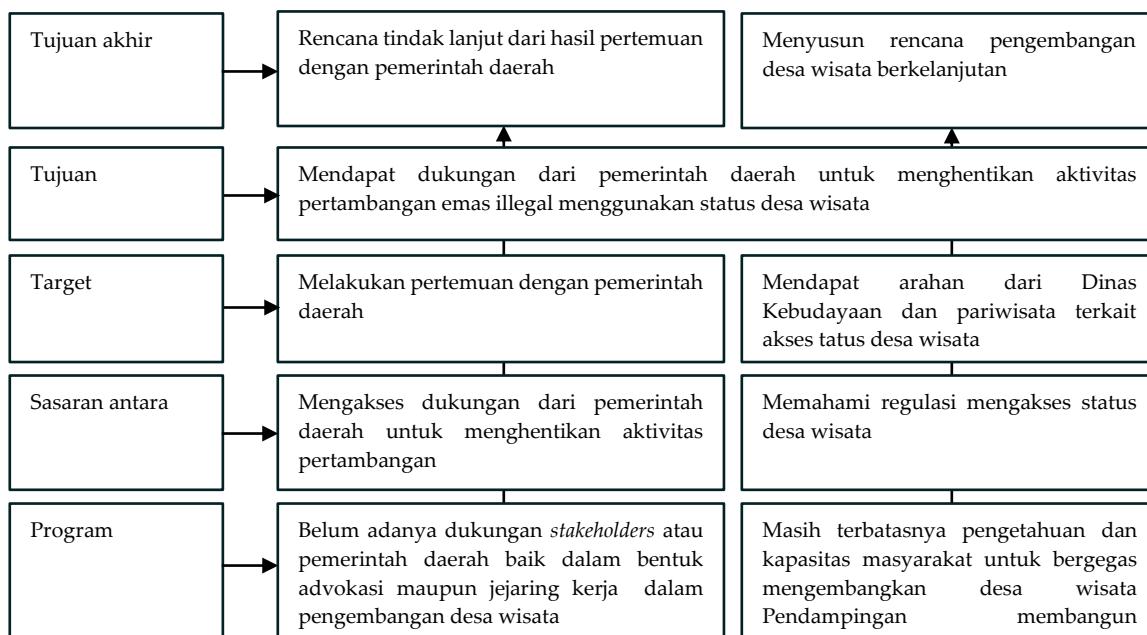
Desa Sungai Telang memiliki setidaknya 18 titik lokasi air terjun berbasis di sepanjang aliran sungai yang telah teridentifikasi memiliki peluang wisata. Sementara di sekitar perumahan penduduk yang juga berbasis pada aliran Sungai, terdapat sepuluh titik Lubuk Larangan (baca; Sari et al., 2016). Di belakang permukiman warga atau sisi selatan dari kantor Desa terdapat bukit Puhong yang telah mendapat beberapa sentuhan untuk dikembangkan menjadi objek wisata namun belum memenuhi kriteria destinasi wisata. Bukit Puhong sendiri berada di kawasan Hutan Desa yang dimiliki Sungai Telang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.301/Menhet-II/2012 seluas ±1.000 Hektar.

Analisis Kritis terhadap Masalah yang Dihadapi

Mengingat pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berbasis masalah yang dihadapi oleh masyarakat Sungai Telang, maka strategi pemberdayaan yang digunakan adalah analisis pohon masalah, analisis pohon harapan, dan analisis gap antara masalah, harapan, dan program pemberdayaan. Analisis pohon masalah dan pohon harapan digunakan agar masyarakat mampu mendefinisikan dan menganalisis masalah yang dihadapi (Afandi, 2017). Sementara analisis gap masalah, harapan dan program pemberdayaan digunakan untuk merencanakan dan merealisasikan program pemberdayaan (Afandi, 2017).

**Gambar 4. Hierarki analisis pohon masalah**

Melalui analisis pohon masalah diketahui permasalahan mendasar yang tengah dihadapi oleh masyarakat Sungai Telang adalah belum adanya pendekatan strategis untuk menghentikan pertambangan emas illegal secara permanen.

**Gambar 5. Hierarki analisis pohon harapan**

Setelah merumuskan hierarki analisis pohon masalah, selanjutnya dilakukan analisis pohon harapan. Terdapat dua target yang diharapkan dapat tercapai. Pertama, melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah. Dan kedua, mendapat arahan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait akses status desa wisata.

Rencana dan Aksi Pemberdayaan

Setelah analisis pohon masalah dan pohon harapan, selanjutnya dilakukan analisis gap masalah, harapan dan strategi program pemberdayaan. Terdapat dua strategi program yang akan digunakan dalam pemberdayaan ini yaitu; pertama, edukasi membangun jejaring kerja dengan stakeholders atau pemerintah daerah dalam mengembangkan desa wisata. Dan kedua, pendampingan membangun pengetahuan dan kapasitas masyarakat untuk bergegas melakukan pengembangan desa wisata

Tabel 2. Analisis gap masalah, harapan dan strategi program

Masalah	Harapan	Strategi Program
Belum ada inisiatif membangun komunikasi dengan pemerintah daerah	Melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah	Edukasi membangun jejaring kerja dengan <i>stakeholders</i> atau pemerintah daerah dalam mengembangkan desa wisata
Belum ada arahan dari dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait regulasi desa wisata	Mendapat arahan dari Dinas Kebudayaan dan pariwisata terkait akses tatus desa wisata	Pendampingan pengetahuan dan kapasitas masyarakat mengembangkan desa wisata

Minimnya sumber daya manusia menjadi masalah yang serius dalam pengembangan desa wisata (Guan et al., 2019). Dalam konteks Sungai Telang, mengingat kesadaran pengembangan desa wisata telah terbangun, masalah berikutnya adalah bagaimana kualitas masyarakat melakukan pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Pemberdayaan ini kemudian memfasilitasi peningkatan kapasitas teknis pengembangan awal desa wisata yang melibatkan narasumber lokal yang kompeten dalam pengembangan desa wisata. Kegiatan tersebut dilaksanakan menggunakan pendekatan *focus group discussions*.



Gambar 6. Fasilitasi penguatan kapasitas pengembangan desa wisata

Melalui fasilitasi peningkatan kapasitas pengembangan desa wisata, dipahami bahwa dalam pengembangan desa wisata dibutuhkan proses yang berkelanjutan. Selain dibutuhkan keterlibatan setiap unsur masyarakat yang menjadi aktor pengembangan desa wisata, peran perangkat daerah juga sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi akses bagi Desa Sungai Telang memiliki status desa wisata.



Gambar 7. Fasilitasi membangun jejaring kerja

Selanjutnya dilakukan fasilitasi membangun jejaring kerja. Fasilitasi ini dimaksudkan untuk memfasilitasi membangun kemitraan dengan pemerintah daerah. Untuk mengakses status desa wisata, salah satu proses yang harus dilalui adalah mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Melalui kegiatan tersebut, disepakati untuk segera melakukan pertemuan dengan Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Bungo guna menyampaikan permasalahan pertambangan dan wacana pengembangan desa wisata.



Gambar 8. Membangun jejaring kerja dengan Wakil Bupati

Pertemuan dengan pemerintah daerah kemudian dapat terealisasi yakni dengan Wakil Bupati di rumah dinasnya. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah desa, pengurus Pokdarwis, dan peneliti menyampaikan konteks sumber daya alam Desa Sungai Telang yang memiliki peluang pariwisata terancam oleh aktivitas pertambangan emas illegal menggunakan alat berat. Kemudian disampaikan pula analisis pentingnya segera mengembangkan destinasi wisata untuk mengakses status desa wisata sebagai Upaya permanen melindungi seluruh potensi sumber daya alam dari aktivitas pertambangan. Wakil Bupati merespon positif hal tersebut dan bersedia memfasilitasi Masyarakat Sungai Telang untuk melindungi alamnya dengan program pengembangan desa wisata berkelanjutan.

Tak berselang lama, Wakil Bupati kemudian berkunjung ke Desa Sungai Telang Bersama Camat Kecamatan Bathin III Ulu. Dalam kunjungan tersebut, terdapat dua agenda sebagai bentuk penguatan menghentikan aktivitas pertambangan, *pertama*, Wakil Bupati bersama masyarakat melakukan ritual adat dengan membaca Surat Yasin bersama setelah Shalat Jum'at. Ritual adat tersebut diyakini oleh masyarakat lokal dapat memberikan efek berupa "kesulitan" bagi para pelaku pertambangan emas illegal menggunakan alat berat.

(a)



(b)

Gambar 9. (a) Sambutan Wakil Bupati dalam ritual adat pembacaan surat Yasin, (b) diskusi Wakil Bupati dengan Masyarakat Sungai Telang

Kedua, diskusi Wakil Bupati dengan Masyarakat Sungai Telang. Kegiatan tersebut diawali dengan pemaparan peneliti tekait konteks sumber daya alam yang memiliki peluang pariwisata dan analisis peluang pengembangan desa wisata sebagai upaya menghentikan aktivitas perambangan secara permanen. Dalam diskusi tersebut, disepakati dua hal yaitu, keterlibatan Masyarakat dalam pengembangan desa wisata dan pertemuan kembali dengan Wakil Bupati dengan melibatkan perangkat daerah yang terkait dengan pengembangan desa wisata.



Gambar 10. FGD

dengan Wakil Bupati

dan beberapa perangkat daerah

Berikutnya, *focus group discussions* dengan Wakil Bupati dan beberapa perangkat daerah sebagai agenda terakhir dari rangkaian kegiatan pemberdayaan ini dapat terealisasi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati, Eselon Satu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Camat bathin III Ulu, Warsi, perangkat desa, Pokdarwis, dan peneliti yang di kantor Bupati Kabupaten Bungo. Isu pengembangan Desa Sungai Telang sebagai desa wisata direspon positif oleh masing-masing perangkat daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengusulkan agar segenap unsur yang terlibat dalam pengembangan desa wisata Sungai telang segera menyiapkan persyaratan-persyaratan untuk mengajukan status desa wisata. Salah satu syarat pertama yang harus diakses adalah menyiapkan minimal satu destinasi wisata. Sementara Wakil Bupati menyatakan bersedia memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia terkait manajemen pengelolaan pariwisata. Selain itu, Wakil Bupati juga meminta Pokdarwis dan perangkat desa untuk segera Menyusun master plan pengembangan desa wisata.

Pembahasan

Pemberdayaan dimaknai beragam oleh banyak pakar (Drydyk, 2017). Dalam konteks masyarakat Sungai Telang, pemberdayaan dimaksudkan untuk membantu masyarakat sebagai kelompok rentan melalui tindakan dan program sosial (Chen et al., 2017) untuk mewujudkan transformasi sosial (Zhao et al., 2022). Dengan kata lain, transformasi sosial bagi masyarakat Sungai Telang hanya akan terjadi melalui pemberdayaan. Wujud transformasi sosial yang dimaksud dalam pemberdayaan ini berupa usaha mengakses status desa sebagai tameng dari aktivitas pertambangan emas ilegal menggunakan alat berat.

Pengelolaan potensi desa dalam bentuk pengembangan pariwisata berbasis desa wisata di Desa Sungai Telang dimaksudkan untuk menjaga sumber daya alam serta lingkungan desa agar tetap terjaga keasriannya (Istiyanti, 2020) karena syarat dari suatu desa wisata adalah turut terjadinya konservasi lingkungan desa (Rochman, 2016). Di beberapa daerah, pemberdayaan pengembangan desa wisata merupakan program pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan (Atok et al., 2022). Di Desa Sungai Telang sendiri, belum ada program pemerintah daerah terkait pengembangan desa wisata. Maka kemudian, pemberdayaan ini memfasilitasi masyarakat mengakses dukungan dari pemerintah daerah untuk mengakses pengembangan pariwisata berbasis desa wisata yang teresertifikasi.

Berdasarkan hasil kunjungan Wakil Bupati Kabupaten Bungo di Desa Sungai Telang dan *focus group discussions* dengan beberapa perangkat daerah, pemerintah daerah ikut mengecam aktivitas pertambangan emas illegal menggunakan alat berat dan menyarankan segera mengakses status desa wisata sebagai acuan legalitas pelarangan aktivitas pertambangan. Masyarakat Sungai Telang yang dikoordinir pemerintah desa dan Pokdarwis perlu bergegas melakukan pengembangan minimal satu destinasi wisata sebagai salah satu syarat pengajuan status desa wisata, dan dalam jangka panjang mengembangkan seluruh potensi desa menjadi pariwisata berbasis desa wisata berkelanjutan (Kafabih, 2023). Selain itu, master plan juga sangat penting untuk segera dirumuskan agar menjadi pengembangan pariwisata berbasis desa wisata di Desa Sungai Telang menjadi terarah.

Penting diketahui bahwa untuk mewujudkan aktivitas pengembangan desa wisata, masyarakat perlu menjadi inisiator, bertindak sebagai pelaksana, dan sebagai penerima manfaat (Laraswai et al., 2020). Maka kemudian, idealnya pengembangan desa wisata tidak hanya mengandalkan Pokdarwis (Sukmawati, 2022), tetapi juga melibat-aktifkan masyarakat lokal sehingga terbangun kesamaan kebutuhan akan pengembangan desa wisata. Peran aktif masyarakat lokal merupakan instrumen yang sangat diperlukan dalam pengembangan pariwisata pedesaan, juga untuk mencapai tata kelola pariwisata yang efektif (Bichler, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelusuran wilayah di Desa Sungai Telang, terdapat 18 titik lokasi air terjun, 10 titik Lubuk Larangan, dan Bukit Puhong yang dapat dikelola dalam pengembangan pariwisata berbasis desa wisata secara berkelanjutan. Potensi-potensi tersebut terancam aksistensinya oleh aktivitas pertambangan emas illegal menggunakan alat berat. Maka kemudian Masyarakat harus bergegas mengidentifikasi dan menentukan pendekatan strategis yang relevan untuk menghentikan pertambangan. Setelah melalui tahapan identifikasi dan analisis kritis terhadap masalah yang dihadapi, masyarakat menentukan akses desa wisata sebagai strategi yang dianggap efektif menghentikan aktivitas pertambangan.

Untuk mewujudkan hal tersebut pemberdayaan ini melakukan fasilitasi penguatan kapasitas pengembangan desa wisata dan fasilitasi membangun jejaring kerja. Dua kegiatan tersebut ditindak-lanjuti dengan pertemuan Pokdaris, pemerintah desa, dan Wakil Bupati yang disusul dengan kunjungan Wakil Bupati ke Desa Sungai Telang sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan. Dan terakhir, focus group discussions dengan Wakil Bupati dan beberapa perangkat daerah yang melahirkan agenda pengembangan pariwisata berbasis desa masyarakat Sungai Telang.

Program pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Telang masih terbatas pada Pokdarwis dan perangkat desa, belum mencakup seluruh lapisan masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan pengembangan model pemberdayaan yang lebih partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya Pokdarwis dan perangkat desa. Selain itu, pengembangan kapasitas masyarakat dalam resolusi konflik juga perlu menjadi fokus pemberdayaan selanjutnya.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Terimakasih pula kepada LPPM UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengabdian. Juga disampaikan terimakasih kepada pemerintah desa, Pokdarwis, dan Masyarakat Desa Sungai Telang yang telah berpartisipasi dan mensukseskan kegiatan ini.

REFERENSI

- Afandi, A. (2017). Modul Riset Transformatif. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Benjamin-Thomas, T. E., Corrado, A. M., McGrath, C., Rudman, D. L., & Hand, C. (2018). Working Towards the Promise of Participatory Action Research: Learning From Ageing Research Exemplars. *International Journal of Qualitative Methods*, 17(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406918817953>
- Bichler, B. F. (2021). Designing tourism governance: The role of local residents. *Journal of Destination Marketing and Management*, 19(October), 100389. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.100389>
- Bisnis, J., & Vol, I. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui. 13(1).
- Budiman, N., Irwandi, I., & Maijar, A. (2022). Pemetaan Dan Pengembangan Potensi Wisata Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 11. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v4i1.10814>
- Cain, T. (2014). The Sage handbook of action research: participative inquiry and practice. In *International Journal of Research & Method in Education* (Vol. 37, Issue 4). <https://doi.org/10.1080/1743727x.2014.937521>
- Chen, Z., Li, L., & Li, T. (2017). The organizational evolution, systematic construction and empowerment of Langde Miao's community tourism. *Tourism Management*, 58, 276–285. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.03.012>
- Chevalier, J. M. (2019). Participatory action research: Theory and methods for engaged inquiry. Routledge.
- Di, S., Pendem, D., Karanganyar, M., Prasta, M., Pradipta, Y., & Wahyuningsih, H. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokdarwis Untuk Mengembangkan Desa Wisata. 16(1).
- Drydyk, J. (2017). Empowerment, agency, and power. In *Gender Justice and Development: Vulnerability and Empowerment* (pp. 17–30). Routledge.
- Dudgeon, P., Scrine, C., Cox, A., & Walker, R. (2017). Facilitating empowerment and self-determination through participatory action research: Findings from the national empowerment project. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–11. <https://doi.org/10.1177/1609406917699515>
- Equilibria, J., Vol, P., Equilibria, J., & Vol, P. (2016). *Jurnal Equilibria Pendidikan* Vol. 1, No. 1, 2016. 1(1).

- Guan, J., Gao, J., & Zhang, C. (2019). Food Heritagization and Sustainable Rural Tourism Destination : The Case of China ' s Yuanjia Village.
- Istiyanti, D. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening (Community Empowerment Through Development of Tourist Villages in Sukawening Village). *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(1), 53–62.
- Junaid, I., & Salim, M. A. M. (2019). Peran organisasi tata kelola dalam pengelolaan Desa Wisata Nglangeran, Yogyakarta. *PUSAKA: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event*.
- Kafabih, A. (2023). Pendampingan Optimalisasi Aset untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 53–63. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.202351>
- Raj, G., Feola, G., Hajar, M., & Runhaar, H. (2022). Power and empowerment of grassroots innovations for sustainability transitions: A review. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 43, 375–392. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2022.04.009>
- Resa, N. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan Desa Wisata Batu Mirau di Pesisir Barat. *UIN RADEN INTAN LAMPUNG*.
- Rochman, N. (2016). Model pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Equilibria Pendidikan*, 1(1).
- Sari, D., Zakaria, I. J., & Novarino, W. (2016). Pengelolaan Lubuk Larangan sebagai Upaya Konservasi Perairan di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo , Jambi. 3.
- Zhao, Z., Wang, Y., Ou, Y., & Liu, L. (2022). Between Empowerment and Gentrification: A Case Study of Community-Based Tourist Program in Suichang County, China. *Sustainability (Switzerland)*, 14(9), 1–17. <https://doi.org/10.3390/su14095187>

Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2025 M. Gazali, Najmul Hayat

Published by LP2M of IAIN Syekh Nurjati Cirebon